

## Upaya Mengaktifkan Politik Akal Sehat Untuk Membangun Demokrasi di Lingkungan V Kelurahan Sidorejo

Ida Nurjana Tamba<sup>1</sup>, Tawarika M. Pandiangan<sup>2</sup>, Yuli Indriani Lubis<sup>3</sup>, Julia Ivanna<sup>4</sup>

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: [idanurjana924@gmail.com](mailto:idanurjana924@gmail.com)<sup>1</sup>, [pandiangentawarika@gmail.com](mailto:pandiangentawarika@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[yuliindrianylubis@gmail.com](mailto:yuliindrianylubis@gmail.com)<sup>3</sup>, [juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** Indonesia's territory has its administrative division, which will be the last level in its division. The implementation of regional reform by revitalizing decentralized principles and the relief duty so that the purpose of regional autonomy in societal censorship becomes closer. The background of this is the setting of the head of the environment as a hand extension from a mayor with his duty to help people in administrative management to try to prevent and address the problems that are most likely around the community. The complexity of society's aspirations as the sovereign people of this democratic country, with input of support and requirement facing the binding policy regulation, the ward's head will participate in supervising the struggle for aspects of life in its environment. The purpose of research can specifically tell the political presence of common sense in the community by considering the political involvement of people. Qualitative research methods with a descriptive approach and data-collection techniques resulting from interviews conducted with the Sidorejo environmental head. Studies show that the involvement of the environmental community is in safe zones and still follow government-established procedures. This is what the ward head needs to cultivate in order to maintain a well that is already endemic by pursuing a critical approach and dialogue.

**Keywords :** Democracy, Head of neighborhood, Politics of common sense, Public service.

**Abstrak.** Wilayah Indonesia mengalami pembagian wilayah secara administratif, Kelurahan menjadi tingkat terakhir dalam pembagiannya. Penerapan pemekaran daerah dengan merevitalisasi asas desentralisasi dan tugas pembantuan agar tujuan otonomi daerah dalam penyelenggaraan masyarakat menjadi lebih dekat. Hal ini yang melatarbelakangi dibentuknya kepala lingkungan sebagai perpanjangan tangan dari lurah dengan tugasnya membantu masyarakat dalam kepengurusan administratif hingga berupaya mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.. Kompleksitas aspirasi masyarakat sebagai rakyat yang berdaulat di negara demokrasi ini, baik input berupa dukungan dan tuntutan masyarakat menghadapi regulasi kebijakan yang mengikat membuat kepala lingkungan turut serta mengawasi pergulatan aspek kehidupan masyarakat di lingkungannya. Tujuan penelitian dilakukan secara spesifik dapat mengetahui keberadaan politik akal sehat pada masyarakat lingkungan V dengan mempertimbangkan keterlibatan politik masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik pengumpulan data dari hasil wawancara yang berlangsung dengan kepala lingkungan V Kelurahan Sidorejo. Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan masyarakat lingkungan V berada pada zona aman dan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini yang perlu didayakembangkan oleh kepala lingkungan agar mempertahankan hal baik yang sudah membudaya dengan melakukan pendekatan serta dialog kritis bersama masyarakat.

**Kata Kunci :** Demokrasi, Kepala Lingkungan, Pelayanan publik, Politik Akal Sehat.

### PENDAHULUAN

Kepala lingkungan diunjuk sebagai perpanjangan tangan dalam menjalankan pelayanan bagi masyarakat di wilayah lingkungan yang dipimpin. Sebagaimana dalam Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa :

“Pasal 10 : Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah kelurahan. Pasal 11 : Lingkungan adalah bagian wilayah dari wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.”

Received 17 September 2023 Revised 23 Oktober 2023, Accepted 21 November 2023

\* Ida Nurjana Tamba [idanurjana924@gmail.com](mailto:idanurjana924@gmail.com)

Penerapan pemekaran daerah dengan merevitalisasi asas desentralisasi diartikan bahwa adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang senyatanya terdapat potensi dan kekhasan daerah serta dalam asas tugas pembantuan bahwa adanya pelaksanaan tugas tertentu yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah agar tujuan otonomi daerah dalam penyelenggaraan masyarakat menjadi lebih cepat. Meninjau lika-liku kehidupan masyarakat bersifat kompleks akibat pengaruh arus globalisasi begitu dahsyat membawa perubahan mulai dari cara pandang dan sikap perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat. Tidak dapat terlepas berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus direspon cepat oleh kepala lingkungan, seperti persoalan kericuhan rumah tangga yang berbau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), keluhan masyarakat atas hambatan yang dihadapi dalam kepengurusan administrasi, persoalan sosial, ekonomi, maupun politik dan lain sebagainya.

Sejak terbukanya keran demokrasi pasca orde baru, menunjukkan tahapan perilaku masyarakat madani hingga organisasi masyarakat dengan kepercayaan diri atas kedaulatan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Perjuangan aspirasi bersifat dukungan atau tuntutan lewat ambisi etis demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kebutuhan pelayanan publik semakin digencarkan pemerintah termasuk pada pemekaran daerah yang dibentuk semakin kecil agar proses transaksi politik bersama masyarakat dapat terlaksana dengan cepat dalam rangka menghindari keadaan dan kecemasan politik tanpa publik, urusan publik menjadi urusan privat.

Disini peran politik sangat kuat mempengaruhi aspek kehidupan baik dalam lingkup agama, sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Politik andil dalam menata hidup masyarakat yang berpengharapan kepada keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tak menghilangkan eksistensi rakyat dalam prinsip demokrasi cenderung melahirkan oligarkhi melihat paradigma saat ini tetapi tetap pada substansial yang bertumpu pada "Keutamaan warga negara". Ketepatan demokrasi melahirkan keagungan toleransi. Toleransi yang terbentuk dari setiap etika politik masyarakat yang berlangsung pada pergaulan sosial yang bersifat heterogen. Perbedaan yang signifikan dari elemen masyarakat bukan berarti etika politik yang dimiliki memiliki kekhasan budaya tersendiri. Etika politik lahir politik akal sehat menjadi desakan agar dipahami seluruh masyarakat.

Sulit terwujudnya politik akal sehat secara rasional dipengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang signifikan membuat Indonesia masih tersekat-sekat, padahal mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan dalam

UUD 1945. Melihat cara pandang sebagian masyarakat pada konsep politik berkonotasi negatif dan terkesan menakutkan akibat masyarakat masih awam untuk memahami politik pada konsep akademik.

Perilaku yang ditunjuk, contohnya ketidakcakapan masyarakat menyikapi keputusan yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan perantaranya adalah kepala lingkungan sebagai informan kepada masyarakat untuk disosialisasikan, ternyata keputusan yang dikeluarkan bersifat tidak transparan memenuhi taraf ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, masyarakat tidak semua memahami bahwa keputusan yang dikeluarkan Pemerintah pada prinsipnya harus mengikat tentang kebaikan bersama untuk masyarakat umum. Masyarakat hanya bersikap mengikuti arus tanpa memperdulikan situasi dan kondisi politik khususnya berpengaruh pada upaya pembangunan lingkungan yang disinggahi menjadi terhambat.

Pernyataan tersebut secara gamblang menunjukkan masyarakat tak semua berpolitik akal sehat, dikhawatirkan masyarakat masuk dalam perangkap kedunguan para elit politik yang haus dengan kekuasaan dalam konsensusnya adalah mencari jejaring suara yang luas. Masyarakat tak mampu mengkaji bagaimana dampak yang signifikan jika melihat kesemuanya itu adalah keuntungan atas berkat dari ilahi bukan lagi memikirkan kesengsaraan sepanjang lima tahun kedepan. Sedikit bahkan ketiadaan pengadaan sosialisasi diskusi tentang membangun politik akal sehat dengan sigap mencari kebenaran dan demi mewujudkan ambisi rakyat karena demokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sejalan menurut Nasution (1992:61) bahwa penelitian kualitatif dilaksanakan tanpa alat pengukur, pada hakikatnya peneliti hanya dapat mengamati, mendengar dan mencerna dengan seksama buah interaksi antara peneliti dengan yang diteliti melalui ungkapan dan bahasa yang dapat dipahami dan ditafsirkan tentang lingkungan sekitarnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali sumber data primer dari hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan V Kelurahan Sidorejo bernama Mandapot Harahap. Wawancara dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03/11/2023 beralamat di Jalan Reli No. 30 Medan berlangsung di tempat kediaman Kepala Lingkungan tersebut. Jenis wawancara semi berstruktur digunakan dalam penelitian ini dengan cara peneliti menentukan secara spesifik topik maupun isu yang diangkat seputar politik dengan tujuan dapat mengetahui gambaran keberadaan politik akal sehat masyarakat lingkungan V dapat digali dan diulas secara deskriptif. Selain menggali sumber data primer,

pengumpulan sumber data sekunder dengan teknik studi kepustakaan seperti buku, jurnal, website dan sumber tertulis lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Wawancara dengan Kepala Lingkungan V Kelurahan Sidorejo**

Pertama, peneliti mengajukan pertanyaan terkait permasalahan berbau politik yang pernah terjadi khususnya pada masyarakat di lingkungan V Kelurahan Sidorejo, dan ungkapan yang disampaikan (Informan) Kepala Lingkungan tersebut sejauh ini berdasarkan hasil pengamatan beliau tidak ada permasalahan politik yang terjadi dalam arti lingkungan V berada pada zona aman. Kedua, peneliti mengajukan pertanyaan terkait kebiasaan oknum anggota DPR melakukan kegiatan reses dalam tajuk sosialisasi politik dengan masyarakat dan ungkapan yang disampaikan informan bahwa benar pengadaaan reses menjadi tradisi di tahun politik yang diberlangsungkan pada tempat kediaman beliau. Pada reses tersebut tidak ada menunjukkan permasalahan yang signifikan dan berjalan aman. Masyarakat dengan bebas diberi kesempatan untuk mengajukan keluhan yang dialami dan oknum DPR menanggapi dengan baik. Bentuk respon yang diberikan tentu memerlukan waktu tidak begitu lama untuk berupaya membantu masyarakat dari berbagai keluhan yang diaspirasikan. Serta ada beberapa janji oknum DPR kepada masyarakat lingkungan V sudah terealisasikan.

Dapat diapresiasi, masyarakat telah memahami konsep politik karena keluhan yang diajukan bersifat membuka celah kesejahteraan masyarakat bersama serta menilik tajam bentuk tanggung jawab pemerintah, seperti keluhan kerusakan jalan aspal yang dapat mengganggu aktivitas perjalanan, pengurusan administrasi yang terhambat, masalah keamanan lingkungan, dan masalah ketidakmerataan bantuan dana sosial yang diperoleh bagi fakir miskin.

Ketiga, pertanyaan yang diajukan terkait perencanaan upaya yang belum atau sudah terlaksana dari Kepala Lingkungan membangun politik akal sehat untuk membangun demokrasi di lingkungan masyarakat lebih baik lagi dan jawaban informan mengungkapkan bahwa cukup mengajak masyarakat untuk mengikuti prosedur aturan yang ditetapkan Pemerintah melalui regulasinya, diberi contoh sejauh ini tidak ada permasalahan krusial dalam pelaksanaan Pemilu dari lingkungan V karena kesadaran masyarakat mengikuti mekanisme Pemilu sewajarnya sesuai ketentuan resmi yang dianjurkan.

### **2. Kepala Lingkungan berakal sehat menjadi kebutuhan yang mendesak dalam Pelayanan Publik**

Ketangkasan dan kejernihan berfikir menjadi zat yang dibutuhkan oleh kepala lingkungan untuk bertanggung jawab melakukan pelayanan kepada masyarakat

dilingkungannya. Ketangkasan dianalogikan sebagai kesigapan dengan didukung fisik yang baik serta akal sehat yang memumpuni untuk membenahi masyarakat agar keberadaan situasi lingkungan masuk pada zona aman. Persoalan yang krusial yang terjadi adalah politik karena politik menurut Ramlan Surbakti adalah

*“Interaksi antara Pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu”* (Surbakti, 1998 : 1-8).

Maka pernyataan ini menunjukkan bagaimana penyikapan politik para pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang dimiliki menghadapi konsekuensi besar dalam mewujudkan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik dari Pemerintah menjadi kebutuhan masyarakat berbentuk pengaduan kepada Pemerintah sebagai lembaga yang memfasilitasi pelayanan publik melalui perantara kepala lingkungan sebagai perpanjangan tangan lurah.

Standar pelayanan yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan dan penilaian kualitas pelayanan telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7 dijelaskan bahwa standar pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kewajiban dan janji penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat mengedepankan kualitas, cepat, terjangkau dan terukur.

Akal budi dan nurani menjadi landasan bagi kesadaran manusia dalam berperilaku tindak menghadapi situasi dan kondisi yang mengharuskan diri untuk berkontribusi dalam penyelesaiannya sehingga dapat dinikmati hasilnya tanpa tersekat-sekat. Pembinaan kepala lingkungan tentu berawal dari akal budi yang diharapkan menunjukkan keberadaan etika berfikir yang jernih agar penyelesaian pada persoalan yang terjadi di masyarakat lingkungannya dapat dengan cepat dan tepat terkontekstual. Menghilangkan etika ini bermunculan persepsi dari lapisan masyarakat dengan kontasi “Kepala Lingkungan yang Menyebalkan” karena masyarakat merasa dipermainkan (Sidharta, B. A, 2016: 2).

Kejujuran dan sikap transparansi kepala lingkungan sangat dibutuhkan masyarakat karena secara kewilayahan yang lebih dekat telah mendukung masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Penerapan pemekaran daerah dengan merevitalisasi asas desentralisasi dan tugas pembantuan menaruh kepercayaan kepala lingkungan membenahi masyarakat agar tentram, aman, damai hingga mencapai taraf kesejahteraan. Pernyataan ini dapat disebutkan bahwa dalam perspektif Cybernologik, menurut (Taliziduhu, N, 2003) kepala lingkungan menjadi bagian dari personal pemerintah dengan visinya melindungi hak masyarakat agar tetap

terjaganya prinsip demokrasi yang dibangun dan berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat yang berdaulat.

Pelayanan publik tidak cukup sebagai pemuas aspirasi masyarakat, terbukanya program ini kepala lingkungan dimampukan menjaga profesionalisme bekerja sehingga mengunjuk diri sebagai pribadi yang dapat diteladani oleh masyarakat. Istilah “Ada uang, Cepat selesai” menjadi tak asing terdengar di kalangan masyarakat memancing perspektif masyarakat bahwa Uang menjadi Media Demokrasi (Schechter, 2007). Masyarakat dengan keterbelakangan ekonomi yang tak mendukung tentu merasakan hambatan ini ketika menyuarakan keluhan yang dialami malah mendapatkan sikap acuh tak acuh dari Pemerintah. Padahal, dalam asas pelayanan publik yang harus diterapkan pemerintah diantaranya adanya “Kesamaan Hak” maka apapun status ekonomi dari berbagai masyarakat bukan menjadi pertimbangan ketika aspirasi yang dikeluhkan harus tetap mendapat pelayanan dari Pemerintah. Serta dalam asas tersebut adanya “Akuntabilitas” artinya kepala lingkungan dan pemerintah tingkat atas lainnya menunjukkan tanggung jawab pemberian layanan masyarakat sebagaimana tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang mengikatnya.

### **3. Eksistensi Politik Akal Sehat Masyarakat Demi Membangun Demokrasi yang Sehat**

Keran demokrasi mulai terbuka atas ambisi etis dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari ambisi tersebut, rakyat yang berdaulat telah diberi ruang berdialog kritis terhadap perlakuan pemerintah atas negara Indonesia adalah negara hukum yang mengharuskan setiap warga negara taat terhadap peraturan yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan kuatnya hukum mengikat masyarakat baik dalam berperilaku tindak dan secara substansial nya hukum dibuat demi mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi menilik dinamika hukum cenderung ditemukan permasalahan krusial mengganggu keterjaminan perlindungan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bentuk janji konstitusi semestinya harus dipenuhi.

Modal penguatan masyarakat sebagai subjek utama dalam demokrasi adalah mengaktifkan politik akal sehat agar tidak masuk dalam perangkap kedunguan dari para rezim semata mendapat kekuasaan dan lupa dengan janjinya kepada rakyat. Cara mengaktifkan politik akal sehat adalah hidupan dialektika melalui pertenggaran argumen. Tidak ada alasan rakyat untuk takut memberi argumen bersifat kritis terhadap pergolakan politik pemerintah yang tak sehat. Akal sehat bukan kalkulasi robotik di kepala semacam rasionalitas (Mustofa, A, 2005 : 28), sebagai contoh analoginya sebuah pencitraan para elit politik menarik simpati rakyat untuk membilik dirinya dalam suara Pemilu dan akhirnya menderita pada lima tahun kedepan artinya

rakyat dapat mencurigai surplus kekuasaan. Masyarakat diwajibkan belajar etika berfikir secara jernih dan berposisi agar hasilnya tidak mengecewakan serta membantu membangkitkan demokrasi yang sehat.

## **PENUTUP**

Menganalisa hasil penelitian bahwa lingkungan V Kelurahan Sidorejo berada pada zona aman, tidak ada persoalan politik yang terjadi karena kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Politik akal sehat masyarakat lingkungan V telah tertanam dengan mempertimbangkan pengalaman masyarakat lingkungan V dihadapkan pada kegiatan reses yang terjadi setiap tahun politik. Dominan memberi aspirasi dengan sifatnya demi kebaikan masyarakat bersama dan mengasah tajam kesigapan pemerintah memenuhi aspirasi rakyat yang dinilai terlalu lama ditetapi atau janji tinggal janji. Kepala lingkungan V turut andil lebih cepat karena secara geografis kewilayahan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dalam tugas operasional dapat membuka pelayanan publik agar membantu masyarakat lingkungan V untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Keaktifan politik akal sehat menunjukkan eksisnya karena membuat masyarakat dengan etika berfikir yang jernih dapat berjalan dalam dinamika politik dengan memahami hakikat konsep politik sehingga tidak menciptakan onar dan bertindak sesuai sebagai rakyat yang berdaulat diatas ambisi etis demokrasi “Dari rakyat, Oleh rakyat, dan Untuk Rakyat”. Dengan mengaktifkan politik akal sehat pada lapisan masyarakat dapat membangun demokrasi yang sehat akan membudaya. Upaya mengaktifkan politik akal sehat secara nyata dapat dilakukan dengan cara berposisi. Akal sehat artinya berposisi atau masyarakat dapat bertindak sebagai pengawasan kekuasaan supaya kekuasaan tidak menjadi otoriter dan totaliter. Pembukaan ruang dialog kritis sebaiknya sering dibenahi agar masyarakat semakin cerdas menghadapi peliknya kehidupan politik. Oposisi bagian integral yang melekat pada sistem demokrasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mustofa, A. (2005). *Menyelam ke Samudera Jiwa & Ruh* (Vol. 5). PADMA press.
- Nasution, S. (1992). Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik. *Bandung : Penerbit Tarsito*, 1-409.
- Taliziduhu, N. (2003). *Kybernology: ilmu pemerintahan baru*.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Schechter, D. (2007). *Matinya media: Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sidharta, B. A. (2016). *Ilmu hukum Indonesia: upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Unpar Press.

Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.